

BAB III

ALASAN AMERIKA SERIKAT MEMPERTAHANKAN PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS DENGAN EAST AFRICAN COMMUNITY

Dalam menjalankan hubungan kerja sama perdagangan pakaian bekas dengan Afrika Timur, motif dan kepentingan Amerika Serikat (AS) beragam. AS tidak bertumpu pada peningkatan pendapatan atau penambahan devisa negara melalui perdagangan pakaian bekas ini. Sebab, perdagangan pakaian bekas merupakan jenis perdagangan yang dapat dikatakan sebagai perdagangan ‘memalukan’, baik dari segi negara yang mengimpor serta negara yang mengekspor. Bagi negara eksportir, citra negara tersebut dimata internasional dapat memburuk; karena mayoritas negara-negara di dunia memiliki peraturan mengenai larangan impor pakaian bekas (Steffen, 2017).

Pakaian bekas sejatinya merupakan komoditas yang seharusnya bersifat illegal; terutama apabila ditinjau dari pengaruh buruk yang ditimbulkan pada bidang ekonomi, sosial, serta lingkungan. Sedangkan untuk negara importir, kehadiran pakaian bekas menandakan ketidakmampuan suatu negara untuk menyokong perindustrian tekstil, garmen, serta *retail* di negaranya. Bagi Mugabo, salah satu *fashion icon* dari industri tekstil Rwanda, menyatakan bahwa keputusan pemerintah negaranya (re: menghentikan perdagangan pakaian bekas) adalah persoalan mengenai ‘harga diri’. Menurutnya, merupakan suatu kebanggaan apabila masyarakat Rwanda mengenakan pakaian-pakaian buatan lokal (The Guardian, 2017). Oleh sebab itu, kasus perdagangan pakaian bekas ini tidak cocok apabila hanya dibahas dari segi ekonomi; dan motif utamanya pun bukan hanya sekadar mencari keuntungan materi, tetapi terdapat motif atau alasan lainnya yang mendasari kebijakan luar negeri AS ini.

Kebijakan luar negeri disusun atau dirancang untuk memenuhi keinginan suatu negara; baik demi mencapai kepentingan nasional, keamanan negara,

peningkatan perekonomian, maupun penerapan ideologi. Langkah yang harus ditempuh adalah menciptakan kerjasama dengan negara-negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Sifat kerjasama yang dijalankan pun bisa berjalan dengan damai atau harus menempuh jalur eksploitasi.

Melalui pendekatan *rational actor*, AS dalam bekerjasama dengan negara-negara Afrika Timur yang tergabung di dalam East African Community (EAC), bersikap rasional demi memaksimalkan pencapaian kepentingannya di dalam kerjasama ini. Disini, pemicu rasionalitas AS dalam bertindak sebagai aktor adalah kepentingan untuk menyelesaikan isu lingkungan dan isu politik. AS berharap bahwa kedua isu ini dapat terselesaikan dalam kerjasama perdagangan pakaian bekas dengan EAC. Rasionalitas mengarahkan para pembuat kebijakan untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat memaksimalkan utilitas yang diharapkan (Nau, 1998). Sanksi yang hendak dikeluarkan oleh AS bagi negara-negara EAC yang hendak menghentikan atau mengurangi impor pakaian bekas, merupakan bentuk 'protes' terhadap realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan perencanaan AS. Apabila impor pakaian bekas dihentikan, maka akan mengganggu penyelesaian permasalahan lingkungan dan politik AS. AS menghadapi dilema mengenai jumlah pakaian bekas yang terus bertambah dan produksinya tidak dapat dibendung dan mulai memudarnya pengaruh politik AS di wilayah Afrika, khususnya Afrika Timur. Dibawah ini akan diuraikan mengapa isu lingkungan dan isu politik dapat masuk dan menjadi dasar alasan mengapa AS menjalankan kerjasama perdagangan pakaian bekas dengan EAC. Berikut akan diuraikan secara terperinci mengenai kedua faktor tersebut.

3.1. Kepentingan Politik Amerika Serikat di Wilayah Afrika Timur

Lingkungan atau kondisi perpolitikan dapat berdampak pada kegiatan bisnis atau perdagangan di suatu negara dalam berbagai bentuk. Permasalahan politik dapat meningkatkan resiko dalam perdagangan, dan aktor atau pelaku (negara) dapat kehilangan *profit*. Jika suatu negara berhasil mencapai kepentingan politiknya

terhadap suatu negara lain, maka hasil (*outcomes*) akan sesuai dengan prediksi atau keinginan negara yang kuat, terutama dalam perihal perdagangan. Munculnya permasalahan terkait dengan perdagangan pakaian bekas akan berdampak pada meningkatnya tensi atau ketegangan hubungan politik antar negara. Hal ini terlihat ketika AS mengancam akan mengeluarkan Rwanda dari keanggotaan AGOA, dan negara-negara Afrika Timur lainnya yang berusaha untuk menerapkan pelarangan atau pembatasan impor pakaian bekas. Pakaian bekas, walaupun terkesan seperti permasalahan yang tidak penting, ternyata mampu mempengaruhi hubungan politik yang telah dibangun oleh AS dan negara-negara EAC. Apabila bisnis pakaian bekas ini terganggu, bagaimana AS hendak meningkatkan pengaruh politiknya di negara-negara Afrika Timur? Masuknya berbagai kekuatan dari dunia luar akan mempengaruhi stabilitas perpolitikan di wilayah Afrika, terutama di Afrika Timur. Absennya kestabilan politik di suatu wilayah atau negara dapat mengarah kepada pembentukan lingkungan *decision-making* (pembuatan keputusan) yang tidak diinginkan. Sehingga, keputusan-keputusan yang hadir bersifat jangka pendek (*short-term*) (Shahabad, 2014). Dahulu, AS berhasil mengontrol wilayah Afrika Timur. Namun sekarang, banyaknya intervensi yang datang dari luar sehingga AS harus menyelamatkan posisi strategisnya di wilayah ini.

Pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump, AS menghadapi permasalahan yang cukup berbahaya mengenai strategi regionalnya terhadap Afrika. Padahal, maksud dari kebijakan Trump adalah untuk mengedepankan keamanan nasional, melindungi negara, mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, serta menjaga perdamaian dengan kekuatan. Akan tetapi, tujuan yang hendak dicapai berbanding terbalik dengan usaha yang dilakukan oleh Trump. Sebab, dominasi AS di Afrika mulai mendapatkan tantangan dari China, Rusia, India, bahkan sahabatnya sendiri yaitu Prancis dan Inggris yang juga mengikuti kontestasi perebutan pengaruh di benua tersebut. China melaksanakan kerja sama ekspor secara masif dengan Afrika hingga mencapai angka \$103,19 triliun di tahun 2015 (Brookings, 2017). Fakta berupa data ini berbanding terbalik dengan jumlah ekspor AS ke Afrika, walaupun nilainya masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan China setelah mengalami defisit hingga 66 persen (Financial Times, 2018).

Keinginan AS untuk memperluas perdagangannya dengan Afrika juga disebabkan oleh perkembangan Afrika untuk menjadi wilayah *fastest growing middle-class*, dengan proyeksi pertumbuhan penduduknya akan mencapai setengah dari jumlah populasi dunia di tahun 2050 nanti (Bloomberg, 2018).

Di tahun 2018, AS meluncurkan kebijakan luar negerinya terhadap Afrika yang bertujuan untuk membentuk hubungan persahabatan yang kuat dan erat dengan benua tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan bisnis dan investasi AS di wilayah tersebut (Brookings, 2018). Untuk melawan pengaruh politik China; negara ini melakukannya dengan cara berinvestasi dan melakukan kerjasama besar-besaran dengan taktik *regional approach* ke negara-negara Afrika Timur. AS. meniru taktik China untuk mendapatkan perhatian dan simpati baik dari masyarakat di negara-negara Afrika Timur dan para pemimpinnya, yakni dengan usaha untuk melakukan aktivitas perdagangan pakaian bekas secara masif (Brookings, 2018). Menurut data dari United States Agency for International Development (USAID), negara-negara EAC mulai beralih mengimpor pakaian bekas serta pakaian baru dari China (All Africa, 2018).

Kwasi Pempoh, Direktur Eksekutif dari Center for Democratic Development di Accra, menyebutkan bahwa AS masih berfokus pada kebijakan politik yang bersifat *'securocrats'*, dan terjebak di dalam era setelah perang Irak (Financial Times, 2018). Akhir-akhir ini, AS mengeluarkan strategi kebijakan terbarunya terkait kerja sama dengan Afrika, tetapi kontras dengan agenda militer yang dikedepankan sejak dulu. Strategi ini dinamakan *American First*, sesuai dengan agenda yang dicita-citakan oleh Trump namun dengan konteks yang berbeda. Strategi politik ini memiliki tiga karakteristik utama, yaitu memperkuat hubungan dagang AS dengan negara-negara di wilayah Afrika, melawan ancaman teroris islam radikal dan konflik separatisme lainnya, serta memastikan bantuan-bantuan yang diberikan oleh AS digunakan secara efisien dan efektif (Steinbock, 2019). Dari ketiga tujuan tersebut, hanya satu strategi yang bersifat militeristik, dan yang lainnya memfokuskan pada pengembangan ekonomi Afrika. Strategi ini pun dicurigai bertujuan untuk menandingi *One Belt One Road* (OBOR) milik China

yang juga sedang memperluas pengaruh politiknya di wilayah Afrika. Negara-negara ini, termasuk AS berusaha menggunakan strategi ekonomi untuk mencapai kepentingan politik di Afrika Timur. AS berusaha untuk mengurangi pengaruh China ke negara-negara Afrika Timur dan berusaha mencari dukungan dari negara-negara Afrika, khususnya Afrika Timur. Bahkan, dinyatakan oleh James Mattis, mantan Menteri Pertahanan AS, mengenai rencana negaranya di Afrika Timur :

“Great power competition, not on terrorism, is now the primary focus of US national security. We face growing threats from revisionist powers as different as China and Russia are from each other...To those who threaten America’s experiment in democracy, they must know if you challenge us, it will be your longest and worst day.” (AlJazeera, 2018).

Terdapat berbagai macam alasan yang mendasari perubahan perpolitikan AS di Afrika yang pada mulanya fokus dalam membasmi kegiatan terorisme, berfokus pada perdagangan (ekonomi). AS berharap bahwa implikasinya adalah peningkatan hubungan kerjasama AS-EAC yang semakin erat. AS berusaha untuk menanamkan investasi skala besar, senilai \$60 triliun untuk melangkahi China, tidak terkecuali penanaman investasi ini juga dilakukan di negara-negara Afrika Timur (AlJazeera, 2018).

Selain itu, adanya perubahan kondisi perpolitikan di AS yaitu di mana hubungan kerja samanya dengan sub-sahara Afrika berubah dari pemberian bantuan kepada LDC menjadi *aid for trade*¹. Fokusnya adalah di mana pemberian bantuan ini semata-mata tidaklah merugikan dari sisi AS; melihat adanya pangsa pasar yang besar di Afrika. Kebijakan baru ini mengimplikasikan bahwa jalur perdagangan merupakan mekanisme yang baik bagi kedua belah pihak. Di satu sisi, AS pun berusaha untuk mengurangi tingkat dependensi negara-negara Afrika yang pada awalnya sangat tinggi, perlahan berkurang. Melalui AGOA, pencapaiannya adalah

¹ Merupakan istilah yang kerap digunakan untuk menyebutkan bantuan yang diberikan dari negara maju ke negara berkembang dalam bentuk perdagangan karena negara-negara ini mengalami kesulitan secara struktural dan infrastruktur yang tidak mendukung untuk masuk ke perdagangan internasional (World Trade Organization, 2018).

untuk membantu meningkatkan *volume* dan keberagaman kerja sama perdagangan antara AS dan negara-negara sub-sahara Afrika. Namun disisi lain, belum mampu mengurangi dependensi mereka terhadap pakaian bekas. AS sangat bergantung dengan perdagangan pakaian bekas ini; sebab perdagangan inilah yang populer dan mendominasi jenis perdagangan antara AS-EAC; serta melalui pendekatan perdagangan inilah AS dapat melakukan monopoli atas negara-negara tersebut.

Bukti bahwa AS memiliki kepentingan politik di Afrika Timur jelas terlihat dalam penerapan *Structural Adjustment Program* (SAP) yang masih berjalan hingga saat ini. Di dalam AGOA ini pun, terjadi pula pengurangan otonomi atau kewenangan suatu negara ketika bekerja sama dengan negara lain. Negara-negara Afrika harus mengadopsi kebijakan berbasis pasar yang disebut *Structural Adjustment Program* (SAP) di tahun 1980, sebagai syarat keanggotaan AGOA. Negara-negara Afrika harus memotong pengeluaran pemerintah, mengurangi pajak korporat (perusahaan), melaksanakan privatisasi, menghilangkan batasan-batasan dalam perdagangan, dan hilangnya proteksi terhadap industri nasional (Heidhues, 2011). Bahkan, apabila negara-negara Afrika yang berpartisipasi dalam AGOA ini gagal untuk mereformasi sistem pasarnya sesuai standar, akan dihapuskan *Generalized System Preferences* (GSP), yakni hilangnya kewenangan untuk memberlakukan *preferential tariffs* (permemberlakuan tarif impor atau ekspor terhadap barang-barang tertentu) (United Nations Conference on Trade and Development, 2010).

AS tidaklah menggunakan ancaman kekerasan atau militer untuk menuntaskan permasalahan ini. AS lebih mengedepankan penggunaan ancaman ekonomi (*economic forces*), berupa pemberian sanksi ekonomi. Sebab, langkah yang diambil oleh AS dianggap sudah mampu efektif untuk membuat negara-negara Afrika Timur berpikir dua kali sebelum menerapkan tarif terhadap perdagangan pakaian bekas.

AS takut bahwa jika nantinya China atau Rusia akan datang ke Afrika, akan membawa instabilitas politik di wilayah tersebut. Sebab, AS sebagai pemain lama merasa bahwa posisinya akan terancam dengan kehadiran satu atau kedua negara

tersebut. Bahkan, China dan Rusia berusaha untuk menjalankan kepentingan politiknya dengan menempuh jalur perdagangan. AS wajar untuk takut, sebab wilayah Afrika merupakan wilayah yang sarat akan konflik. Sehingga, intervensi-intervensi dari luar dapat dengan mudah masuk dan ikut dalam kontestasi perebutan pengaruh politik dengannya. Tipe pemerintahan di negara-negara Afrika masih didominasi oleh tipe rezim *mixed type*, yakni negara-negara Afrika tidak dapat disebut sebagai negara demokrasi namun juga bukan negara dengan tipe pemerintahan otoriter. Dengan kata lain, negara-negara ini memasuki fase peralihan yang rentan dengan perpecahan. Apabila gejolak perpolitikan terjadi, maka aktivitas ekonomi pun akan terhambat, termasuk perdagangan pakaian bekas. Seperti yang telah disebutkan pada BAB I dan BAB II bahwa keuntungan dari perdagangan pakaian bekas sebesar \$151 juta. Inilah alasan mengapa AS mengamankan perdagangan pakaian bekasnya demi mengembalikan kekuasaan dan pengaruh politiknya dimulai regional Afrika Timur. Situasi politik di suatu negara dapat mempengaruhi bidang ekonomi, yang berimbas pula pada bisnis. AS khawatir apabila negara-negara Afrika beralih darinya, maka segala kemudahan dan keuntungan perdagangan dengan Afrika yang didapatkan selama ini akan hilang direbut oleh negara lain.

Kesimpulannya, AS ingin membangun kembali kekuatan politiknya di wilayah Afrika Timur yang mulai mendapat tantangan dari negara-negara yang memiliki tujuan untuk memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut pula, seperti China dan Rusia. Terutama China, yang mulai 'berani' untuk masuk ke wilayah Afrika Timur dan berusaha melaksanakan perdagangan dan penanaman investasi di negara-negara EAC, termasuk perdagangan pakaian bekas. Demi mengejar ketertinggalannya, AS harus mengamankan atau melindungi perdagangan pakaian bekasnya dengan negara-negara EAC demi mengejar kepentingan politiknya; agar negara-negara tersebut tidak beralih untuk berdagang dengan China.

3.1.2. Permasalahan Lingkungan Amerika Serikat akibat Kehadiran Pakaian Bekas

Presiden Donald Trump, di dalam kepemimpinannya berusaha memenuhi kepentingan korporat (perusahaan). Ia menjanjikan akan menghapus pajak serta melonggarkan regulasi sehingga aktivitas perusahaan-perusahaan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang sempat melemah di AS beberapa tahun yang lalu. Terbukti, bahwa pada masa pemerintahannya tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat sebanyak 3 persen (The White House, 2019). Persentase pengangguran pun semakin menurun, dan merupakan angka terendah selama 50 tahun, yaitu sebesar 3,9 persen (NPR, 2018). Harga saham pun melonjak naik hingga mencapai 300 persen terhitung sejak 9 Maret 2009, yang tentunya sangat menguntungkan pihak perusahaan (BBC News, 2018). AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump mengeluarkan biaya sebesar \$1,5 triliun demi melaksanakan reformasi pajak perusahaan. Pajak yang dikenakan menurun drastis dari 35 persen ke angka 21 persen (Fortune, 2019). Namun, dampak dari keputusan Trump untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut ternyata berimbas cukup besar terhadap meningkatnya permasalahan lingkungan.

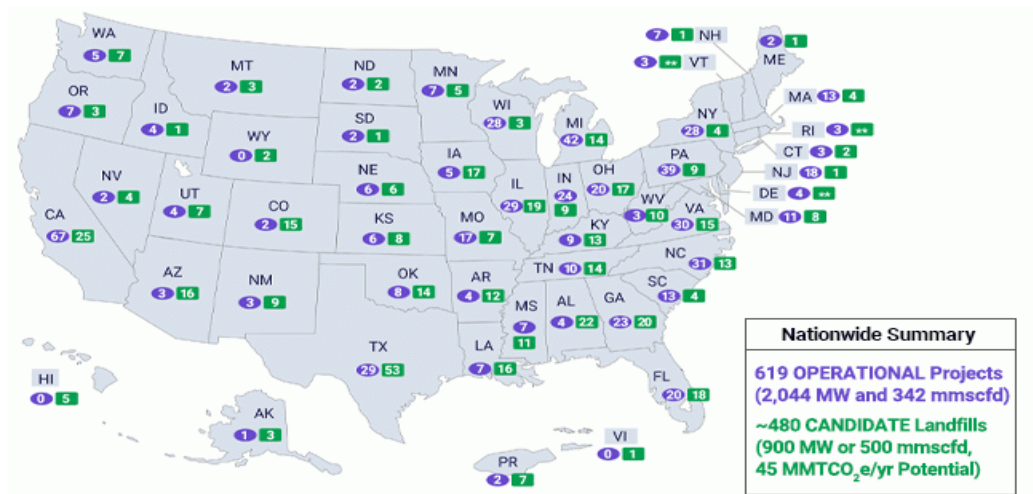
Kondisi lingkungan di AS akibat banyaknya jumlah *textile waste* (sampah pakaian bekas) cukup memprihatinkan, terutama permasalahan mengenai polusi air. Setiap tahunnya, perairan di AS terkontaminasi oleh 1,2 triliun galon polutan dan limbah yang mayoritas berasal dari aktivitas industri pakaian (Chambers, 2011). Sayangnya, perairan bersih di sekitar pemukiman warga juga ikut tercemar akibat kegiatan ilegal yakni pembuangan limbah dan polutan yang dilakukan secara sembarangan. Permasalahan besar lainnya di AS adalah sampah, termasuk sampah tekstil yang menumpuk di wilayah daratan. Sampah-sampah ini memiliki kandungan atau substansi yang dapat mencemari dan merusak kualitas air di dalam tanah, terutama sampah yang bersumber dari garmen atau tekstil. AS terkenal dengan besarnya jumlah sampah daratan (*landfill*) yang dipadati oleh *solid waste*. Jenis sampah atau limbah ini tidak dapat terurai melalui proses alamiah sehingga akan tetap dan terus menumpuk apabila tidak segera ditangani. Akibat kekurangan lahan pembuangan, sampah-sampah ini menjadikan sebagian lokasi “terpaksa”

digunakan sebagai tempat penampungan sampah sementara, termasuk sampah pakaian-pakaian yang tidak terpakai.

Negara kehilangan banyak wilayah yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat yang produktif. Menurut laporan dari Solid Waste Environmental Excellence Protocol (SWEET), terdapat sekitar 2000 lahan pembuangan yang aktif. Beberapa dari lahan tersebut, bahkan sudah mencapai kapasitas maksimum untuk menampung lebih banyak sampah (Global Citizen, 2018). Organisasi ini memprediksikan bahwa dalam 18 tahun mendatang, AS akan kehilangan banyak lahan produktif dan tidak dapat dimanfaatkan sama sekali akibat penumpukan sampah (Thompson, 2018). Wilayah New York sudah mulai memindahkan berbagai sampah yang ke negara-negara bagian lain akibat *over capacity*, yang kerap menjadi langganan pengiriman sampah dari New York salah satunya adalah Alabama. (The Outline, 2018). Bahkan, AS dinobatkan sebagai negara penyumbang sampah terbesar di dunia, dengan tiap penduduknya setidaknya membuang sampah sekitar 1.609 pon per tahunnya.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Environment Protection Agency (EPA), di tahun 2015, jumlah sampah pakaian (*textile waste*) yang tidak didaur ulang sehingga menumpuk sebagai *landfill* berjumlah sebanyak 10,5 juta ton atau sekitar 7,6 persen dari total Municipal Solid Waste (MSW), dan akan terus bertambah setiap tahunnya (Environmental Protection Agency, 2017). Mendaur ulang pakaian pun tidak dapat dijadikan sebagai solusi efektif untuk mengurangi jumlah sampah pakaian di AS. Sebab, menurut data dari Greenpeace, 60 persen pakaian yang diciptakan terbuat dari *polyester*. *Polyester* ini terbuat dari *crude oil* (minyak mentah). Bahan ini ternyata dapat mengeluarkan CO₂ (karbon dioksida) lebih banyak apabila dibandingkan dengan proses pembuatan bahan katun (Martinko, 2016).

Gambar 3.1. Peta Wilayah Potensi *Landfill* di AS



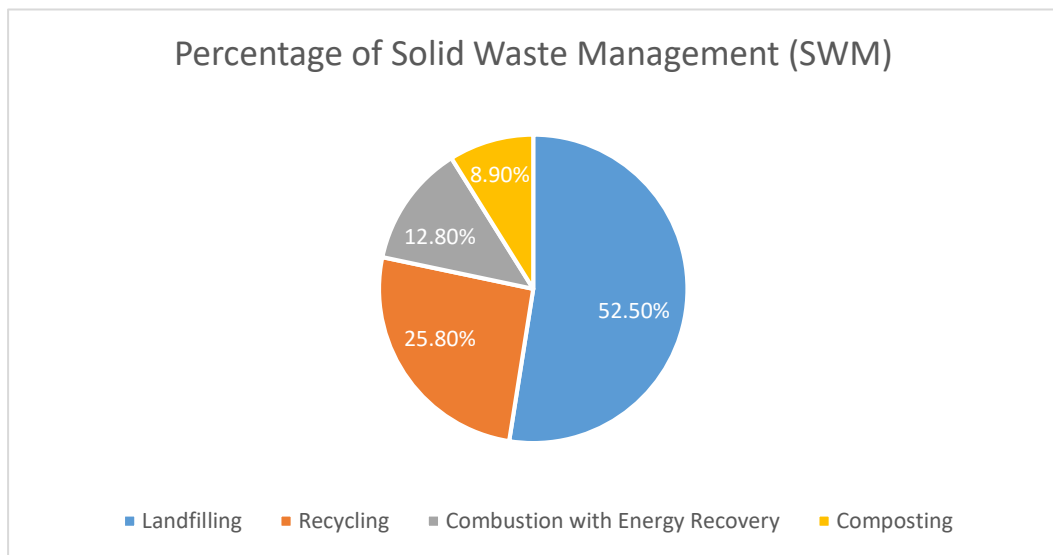
Sumber: <https://www.epa.gov/lmop/project-and-landfill-data-state>

Industri *fashion* menjadi salah satu penyuplai pendapatan negara terbesar, dengan hasil pajak hampir mencapai \$2 triliun per tahunnya. (Joint Economic Committee, 2015). Bahkan, AS memiliki dua kota yang menjadi pusat *fashion*, yaitu New York dan Los Angeles. (New York City Economic Development Corporation, 2015). Dengan begitu pesatnya perkembangan industri *fashion* dan dampak positifnya yang diberikan kepada negara, AS kedepannya akan terus memberikan perhatian, kemudahan serta dukungan bagi perkembangan industri *fashion*, walaupun berefek pada terus bertambahnya jumlah pakaian bekas akibat dari kegiatan produksi. Oleh sebab itu, AS butuh negara-negara EAC sebagai sasaran penjualan pakaian bekas agar aktivitas industri *fashion* tidak ‘terganggu’ oleh problematika pakaian bekas.

Cara yang selama ini ditempuh oleh negara adalah membakar sampah-sampah tersebut. Beberapa wilayah, bahkan mendapatkan izin dari pemerintah untuk dijadikan lahan khusus pembakaran sampah. Sayangnya, solusi yang dikeluarkan tentu menambah permasalahan baru. Pembakaran sampah akan menimbulkan polusi udara, terlebih wilayah pembakaran tersebut terletak dekat dengan pemukiman masyarakat (Global Citizen, 2018). Menurut Environmental

Protection Agency (EPA), AS membakar 33 juta ton sampah setiap tahunnya (Environmental Protection Agency, 2017). Permasalahan ini sangatlah kompleks untuk dapat di atasi oleh pemerintah AS sendiri tanpa meminta, mencari bantuan atau bekerja sama dengan negara-negara lain. Afrika Timur dianggap memenuhi kriteria untuk pelaksanaan kerja sama pakaian bekas ini. Salah satunya, dipengaruhi oleh fakta bahwa negara-negara tersebut belum memiliki kepastian hukum mengenai pelarangan impor pakaian bekas.

Gambar 3.2. Persentase Daur Ulang *Solid Waste*



sumber : www.epa.gov

Permasalahan mengenai aksi daur ulang pakaian pun mengalami kebuntuan. Sebab, adanya ketidakseimbangan jumlah pakaian yang telah direduksi dan didaur ulang menjadi komponen baru, dengan jumlah pakaian yang diproduksi setiap tahunnya. Contohnya seperti perusahaan *fashion* raksasa Hennes and Mauritz (H&M), yang juga beroperasi di Amerika Serikat dan telah membangun sebanyak 578 *retail*. Perusahaan ini memiliki inisiatif untuk melaksanakan kegiatan daur ulang pakaian. Para konsumen dapat menukarkan pakaian-pakaian lamanya dengan kupon diskon untuk pembelian selanjutnya (HuffPost, 2017). Keputusan ini dianggap dapat mengurangi jumlah *Municipal Solid Waste* (MPA) di daratan.

Namun, berdasarkan laporan dari perusahaan tersebut, mereka hanya dapat melaksanakan kegiatan daur ulang pakaian yang mereka ciptakan sebesar 0,7

persen per tahunnya saja (CBC News, 2018). Pihak perusahaan ini pun mengakui, bahwa mereka mengalami kendala dalam minimnya kemampuan teknologi yang mereka miliki untuk melaksanakan daur ulang secara masif. Mereka membutuhkan waktu lebih banyak untuk melaksanakan *Research and Development* (R&D) demi mengatasi isu tersebut (CBC News, 2018).

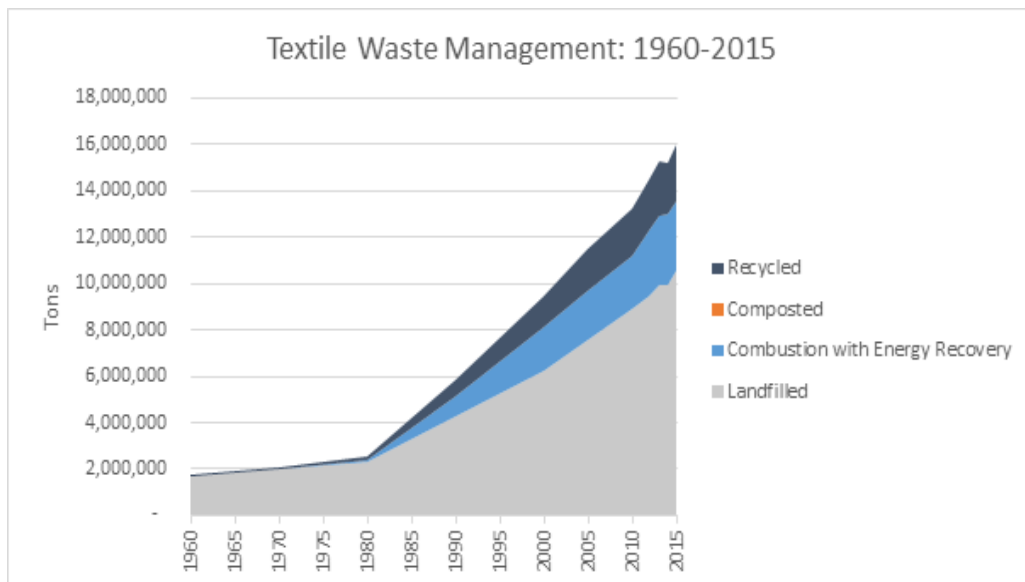
Contoh lainnya datang dari perusahaan *jeans* raksasa di AS yaitu Levi's. Perusahaan ini telah meluncurkan program daur ulang pakaian besar-besaran. Namun, menurut perusahaan ini, mereka mengalami kendala dalam proses daur ulang pakaian. Mereka menyebut bahwa hanya sekitar 20 persen jenis kapas yang dapat didaur ulang pada bahan pakaian dengan kualitas yang kurang baik (CBC News, 2018). Sejauh ini, hanya dua perusahaan raksasa yang telah melaksanakan program daur ulang, yakni H&M dan Levi's. Perusahaan-perusahaan tekstil lainnya tampak belum menyatakan komitmen terhadap pelaksanaan program daur ulang dalam kegiatan manufakturnya.

Daur ulang pakaian (*textile recycling*), merupakan sebuah kegiatan pemrosesan atau pengolahan bahan tekstil yang akan dan sudah menjadi sampah (*waste*) ke bentuk komponen yang baru untuk dimanfaatkan kembali menjadi bahan tekstil lagi atau produk non-tekstil (Hawley, 2019). Proses daur ulang ini terbagi ke dalam tiga kategori pemrosesan yang utama, yaitu secara mekanik, kimia, dan suhu (*thermal*). Namun, kegiatan ini pada akhirnya seringkali menggunakan proses mekanik (Shen & al., 2010). Pada mulanya, limbah tekstil ini memasuki tahap pereduksian serat pakaian. Akan tetapi, apabila tahap awal tersebut tidak berhasil, maka akan memasuki tahap daur ulang untuk memisahkan bahan-bahan *polymer*, *oligomer*, dan *monomer* (Sandin & Peters, 2018).

Banyak beberapa wilayah yang sudah mulai sadar akan bahaya sampah tekstil terhadap lingkungannya. Seperti contohnya negara-negara Eropa, yang mulai berkomitmen untuk melaksanakan daur ulang pakaian secara masif. Namun, hal tersebut tidak dilaksanakan oleh pemerintah di AS. Keadaan ini diperburuk dengan fakta yang diungkapkan oleh pihak Department of Environmental Quality di wilayah North Carolina. Rob Taylor, menyebutkan bahwa nilai material yang

dapat didaur ulang menurun drastis di tahun 2015, hanya sebesar \$80 per ton. Sejak saat itu, kenaikan nilai material daur ulang sangat sulit untuk dicapai. Hingga tahun 2017, nilai material daur ulang hanya ditaksir sebesar \$103,84 per ton (USA Today, 2017). Menurut David Biderman, CEO sekaligus Direktur Eksekutif dari Solid Waste Association of North America, tren penurunan ini didasari pada perubahan kebijakan perdagangan global serta banyaknya limbah yang ditransfer bahkan dijual di luar negeri. Secara keseluruhan, persentase daur ulang limbah di AS hanya mencapai angka 25 persen (USA Today, 2017).

Gambar 3.3. Grafik Manajemen Terhadap Sampah Tekstil di AS



Sumber: Environmental Protection Agency

Industri *fashion* ini mendapat predikat sebagai industri dengan jumlah sampah terbesar kedua di dunia (GreenMatch, 2019). Walaupun adanya aksi untuk melaksanakan *ethical fashion* dan mempromosikan *sustainability*, masih terdapat banyak industri yang menggunakan bahan-bahan tidak ramah lingkungan. Para pelaku industri pun mengungkapkan bahwa apabila mereka menggunakan bahan yang berkualitas tinggi dan ramah lingkungan, harga jual di pasaran tentu akan naik drastis. Sebab, material-material yang dibutuhkan untuk memproduksinya pun terbatas dan sulit untuk diakses dalam jangka panjang (Bain, 2017). Salah satu industri *fashion* menengah yang beroperasi di Toronto, bernama People's Product, telah melaksanakan proses produksi yang memenuhi kriteria ramah lingkungan.

Namun, pihaknya juga mendapat keluhan bahwa harga pakaian yang dijual oleh industri ini jauh lebih mahal dari *brand-brand* lainnya (HuffPost, 2018). Penggunaan bahan-bahan bernilai tinggi seperti sutera, tentunya kurang populer di kalangan masyarakat menengah. Sulit untuk meyakinkan para pelanggan bahwa pakaian yang mereka ciptakan jauh lebih berkualitas dibanding produk-produk *fast-fashion*. Pihak industri seperti ini pun terpaksa harus mengedukasi para pembeli mengenai bahayanya pakaian-pakaian yang beredar sekarang ini (HuffPost, 2018).

Isu mengenai lingkungan di AS semakin memanas pada era pemerintahan Presiden Donald Trump. Setelah negara ini menyatakan akan mundur dari Perjanjian Paris, Trump pun dianggap melakukan deregulasi dan peleluasaan terjadinya kejahatan terhadap lingkungan. Salah satunya adalah memperbolehkan penggunaan pestisida yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Trump juga berseteru dengan Environmental Protection Agency (EPA), dan berencana mengurangi anggaran untuk organisasi ini sebesar 30 persen karena dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan lingkungan (The Hill, 2019). Satu-satunya jalan yang tersedia untuk pengelolaan pakaian bekas adalah mengirimkannya dalam bentuk ekspor ke luar negeri. Proyeksi keuntungannya cukup besar, terutama dalam mengatasi isu lingkungan yang ditimbulkan oleh pakaian bekas. Ketidakmampuan negara ini untuk menyelesaikan permasalahan pakaian bekas secara unilateral, berimbas pada terciptanya perdagangan pakaian bekas dengan negara-negara EAC.

Pasar pakaian bekas ini awalnya hanya populer di kawasan domestik AS saja. Namun, karena permintaan di domestik telah redup dan AS melihat ada pasar di luar negeri terutama di negara-negara Afrika, maka kesempatan ini dimanfaatkan untuk mendapatkan *profit* atau keuntungan. Disini, AS mendapatkan dua keuntungan : menyelesaikan isu lingkungan sekaligus mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pakaian bekas tanpa harus ‘membebani’ para pelaku industri tekstil. Keputusan AS merupakan keputusan yang cukup rasional; mengingat negara ini berusaha untuk memaksimalkan kekuatan ekonominya dalam kancan internasional. Ditambah lagi, kesulitan dan hambatan yang dihadapi untuk

melakukan daur ulang pakaian bekas tidak menguntungkan; jumlah pakaian yang diciptakan akan terus bertambah, dan jumlah pakaian yang telah dan akan didaur ulang tidak sebanding dengan jumlah pakaian yang dijual. AS beruntung karena negara-negara Afrika pada kenyataannya belum mampu untuk memenuhi kebutuhan sandang mereka secara mandiri. Saat pasar berkembang dan melintasi batas negara, potensi untuk melipatgandakan keuntungan yang seimbang juga akan semakin besar. (Gilpin, 1981).

Akan tetapi, apakah negara-negara di Afrika Timur yang tergabung di dalam EAC dan masih tergolong ke dalam kategori *Lesser Developed Countries* (LDC) ini diuntungkan dengan adanya penjualan pakaian bekas? Terlepas dari keinginan negara-negara tersebut berdikari dalam perindustrian tekstil atau garmen, keadaan di lapangan justru membuktikan sebaliknya. Masih banyak masyarakatnya yang bergantung pada ketersediaan pakaian bekas. Adanya permintaan yang membumbung tinggi dari masyarakat miskin, menjadi alasan utama yang mempersulit putusnya rantai ketergantungan ini. Di satu sisi, perdagangan pakaian bekas mengakibatkan banyaknya industri lokal yang beroperasi di bidang tekstil menjadi bangkrut. Namun, disisi lain, distribusi pakaian bekas ini membuka lapangan kerja baru (contohnya importir dan distributor) yang mampu memperkerjakan banyak orang. Terlebih lagi, pekerjaan ini tidak membutuhkan *skill* atau kemampuan khusus seperti menjahit atau mendesain pakaian, sehingga para masyarakatnya yang mayoritas berpendidikan rendah dapat menggantungkan hidupnya lewat mata pencaharian tersebut. Menurut data dari USAID, perdagangan pakaian bekas mampu menciptakan sekitar 355.000 mata pencaharian bagi negara-negara EAC (USAID, 2017).

Kesimpulannya, isu lingkungan di AS turut mempengaruhi tindakan negara ini untuk tetap melaksanakan perdagangan pakaian bekas. Sebab, AS memiliki permasalahan lingkungan yang masif; disebabkan oleh kehadiran pakaian bekas sebagai *textile waste* (sampah tekstil). *Textile waste* ini sulit untuk didaur ulang dan jumlahnya akan terus bertambah karena masyarakat AS yang cenderung konsumtif terhadap pakaian. Jumlah industri *fast-fashion* yang berkomitmen untuk

melaksanakan daur ulang pakaian bekas yang berasal dari perusahaannya pun masih sangat minim. Oleh karena itu, satu-satunya cara yang rasional demi mengentaskan permasalahan pakaian bekas adalah dalam bentuk perdagangan pakaian bekas. Adanya *demand* yang besar dari negara-negara Afrika Timur menghasilkan dua keuntungan sekaligus dari perdagangan pakaian bekas: menyelesaikan permasalahan lingkungan domestik sekaligus mendapatkan *profit* dari hasil perdagangan tersebut.

3.2. Kesimpulan

Menurut Rosneau, akibat banyaknya isu yang menciptakan sebuah konflik yang tidak sesuai dengan batas-batas politik serta negara tidak mampu menyelesaikannya dengan jalur *unilateral* atau sepihak, membutuhkan bantuan berupa kerja sama apabila isu tersebut ingin ditindaklanjuti (Vasquez & Mansbach, 1984). Inilah yang terjadi dengan hubungan kerja sama AS-EAC melalui *platform* AGOA mengenai perdagangan pakaian bekas. Menurut pembahasan yang telah diuraikan secara mendetail di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan: keputusan AS untuk tetap mempertahankan kerja samanya dengan EAC dalam forum AGOA; didasari karena AS membutuhkan negara-negara EAC untuk mencapai kepentingannya. Inilah yang terjadi antara hubungan kerja sama pakaian bekas AS dengan EAC. AS ternyata bertindak secara rasional. Rasionalitas ini dibuktikan dengan motif AS dalam menjalankan kerjasama perdagangan pakaian bekas dengan EAC. Yang pertama, yaitu AS memiliki kepentingan politik di dalamnya, yakni untuk mengembalikan pengaruhnya dan kekuatan geopolitiknya dimulai dari wilayah Afrika Timur. Akan tetapi, munculnya pihak-pihak lain yang tidak diinginkan (terutama China, dimana AS sedang melaksanakan perang dagang dengan negara tersebut) yang dianggap akan mengganggu kepentingan AS. Sehingga, negara ini berusaha mengamankan perdagangan pakaian bekasnya dengan negara-negara EAC disebabkan oleh jenis perdagangan inilah yang mendominasi kerjasama dagang antara kedua belah pihak. AS pun khawatir karena

China mulai melakukan kerjasama perdagangan pakaian bekas yang masif dengan negara-negara EAC.

Motif yang kedua, yaitu didasari oleh permasalahan lingkungan AS yang disebabkan oleh textile waste. *Textile waste* ini merupakan limbah yang berasal dari pakaian bekas. Textile waste ini menjadi sampah yang memadati lahan-lahan produktif (*landfill*) dan mencemari lingkungan. Aktivitas industri *fast-fashion* yang tidak dapat dibendung serta pola masyarakat yang cenderung konsumtif terhadap pakaian ikut berkontribusi ‘menyumbang’ pakaian bekas dalam jumlah besar dan sulit untuk dikontrol. Sehingga, satu-satunya keputusan yang rasional bagi AS untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan cara menjualnya ke negara-negara Afrika Timur. Negara-negara ini membutuhkan pakaian karena industri pakaian domestik telah redup. AS mendapatkan dua keuntungan sekaligus dari hasil perdagangan ini: *profit* berupa keuntungan penjualan dan permasalahan lingkungan dapat teratasi.